

PEMBERDAYAAN USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH DI KOTA BALIKPAPAN DALAM MENDUKUNG PEMBANGUNAN IBU KOTA NUSANTARA (IKN)

FITYAN HIBATULLOH HASAN AL BANA

NPP. 32.0778

Asdaf Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur

Program Studi Pembangunan Ekonomi dan Pemberdayaan Masyarakat

Email: 32.0778@praja.ipdn.ac.id

Pembimbing Skripsi: Dwi Indah Kartika S.Pd., M.Si.

ABSTRACT

Problem Statement: Balikpapan City, as one of the buffer regions for the Nusantara Capital City (IKN), plays a strategic role in providing goods and services for the development of IKN. The Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs) sector is expected to drive the local economy; however, it still faces low digital literacy, limited access to information, and suboptimal policy coordination among government agencies. **Purpose:** This study aims to analyze the forms of MSME empowerment implemented by the Department of Cooperatives, MSMEs, and Industry of Balikpapan City, identify supporting factors that strengthen these programs, and explore the obstacles encountered during the empowerment process. **Method:** A qualitative descriptive approach with a case study design was employed. Data were collected through in-depth interviews, observations, and documentation involving informants from the Department of Cooperatives, MSMEs, and Industry, as well as MSME actors in Balikpapan. The data were thematically analyzed to highlight empowerment patterns, supporting factors, and emerging barriers. **Results:** MSME empowerment in Balikpapan has been carried out through entrepreneurship and digital literacy training, product promotion facilitation, access to People's Business Credit (KUR), and technical and managerial mentoring. Supporting factors include Balikpapan's strategic geographic location, an increasing working-age population, and adequate regulatory frameworks. Obstacles include uneven program outreach, limited capacity of entrepreneurs in financial management and digital marketing, and incomplete technology access. **Conclusion:** MSME empowerment should focus on strengthening digital and managerial capacities and fostering inter-agency synergy so that programs are more integrated and reach all areas of Balikpapan. **Keywords:** empowerment; MSMEs; economic development; Balikpapan; IKN.

ABSTRAK

Permasalahan/Latar Belakang: Kota Balikpapan sebagai salah satu kota penyangga Ibu Kota Nusantara (IKN) memiliki peran strategis dalam penyediaan barang dan jasa bagi pembangunan IKN. Sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) diharapkan menjadi motor penggerak ekonomi lokal, tetapi masih dihadapkan pada rendahnya literasi digital, keterbatasan akses informasi, dan koordinasi kebijakan yang belum optimal antar OPD. **Tujuan:** Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk-bentuk pemberdayaan UMKM yang dilaksanakan oleh Dinas Koperasi, UMKM, dan Perindustrian Kota Balikpapan, mengidentifikasi faktor pendukung yang memperkuat program tersebut, serta menggali hambatan yang dihadapi selama proses pemberdayaan. **Metode:** Pendekatan penelitian yang

digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan studi kasus. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi bersama narasumber dari Dinas Koperasi, UMKM, dan Perindustrian serta pelaku UMKM di Balikpapan. Analisis data dilakukan secara tematik untuk menyoroti pola pemberdayaan, faktor pendukung, dan hambatan yang muncul.

Hasil: Pemberdayaan UMKM di Balikpapan telah dilaksanakan melalui pelatihan kewirausahaan dan literasi digital, fasilitasi promosi produk, akses pembiayaan KUR, serta pendampingan teknis dan manajerial. Faktor pendukung mencakup letak geografis strategis, peningkatan penduduk usia kerja, dan regulasi yang memadai. Hambatan meliputi sosialisasi program yang belum merata, kapasitas pelaku terbatas dalam pengelolaan keuangan dan pemasaran digital, serta akses teknologi yang belum menyeluruh. **Kesimpulan:** Pemberdayaan UMKM harus ditekankan pada penguatan kapasitas digital dan manajerial serta sinergi antar OPD agar program lebih terintegrasi dan menjangkau seluruh wilayah Balikpapan.

Kata Kunci: pemberdayaan; UMKM; pembangunan ekonomi; Balikpapan; IKN

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur merupakan salah satu langkah strategis pemerintah untuk mewujudkan pemerataan pembangunan nasional. Keputusan memindahkan ibu kota ke wilayah ini diharapkan tidak hanya menciptakan pusat pemerintahan baru, tetapi juga menjadi pemicu pertumbuhan ekonomi lokal melalui UMKM. UMKM membutuhkan kepemimpinan yang efektif, karena menurut Handoko et al., (2024) bahwa kepemimpinan yang efektif memberikan UMKM alat, visi, dan strategi yang diperlukan untuk menghadapi dinamika pasar, mengatasi tantangan, dan mencapai daya saing jangka panjang. Dalam konteks tersebut, Kota Balikpapan diposisikan sebagai kota penyangga utama IKN yang bertanggung jawab memenuhi kebutuhan logistik, perdagangan, dan layanan bagi pembangunan ibu kota baru. Berdasarkan pernyataan Santoso et al., (2024) pengembangan usaha mikro merupakan salah satu upaya yang dapat dilakukan dalam rangka pengembangan ekonomi daerah. Peran ini membuat Balikpapan harus memastikan ketersediaan barang dan jasa, sehingga sektor ekonomi lokal terutama Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dituntut untuk berperan aktif dalam mendukung keberlangsungan IKN.

UMKM selama ini telah menjadi tulang punggung perekonomian nasional karena mampu menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar dan berkontribusi signifikan terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Data dari Dinas Koperasi, UMKM, dan Perindustrian Kota Balikpapan menunjukkan peningkatan jumlah UMKM dari 27.542 unit pada tahun 2020 menjadi 90.000 unit pada tahun 2024 (sementara) yang menandakan tumbuhnya minat masyarakat untuk berwirausaha. Pertumbuhan pesat ini membuka peluang bagi Balikpapan untuk memperkuat sektor UMKM sebagai penyedia barang dan jasa lokal bagi kebutuhan IKN. Namun, pertumbuhan jumlah UMKM yang cepat juga memunculkan tantangan terkait kapasitas pelaku usaha, terutama dalam hal akses pembiayaan, ketersediaan infrastruktur produksi, dan kemampuan memasarkan produk ke pasar yang lebih luas.

Dalam rangka mengoptimalkan peran UMKM, pemerintah daerah melalui Dinas Koperasi, UMKM, dan Perindustrian Kota Balikpapan telah menyusun berbagai kebijakan dan program pemberdayaan. Kebijakan ini didasarkan pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM dan Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 12 Tahun 2014 tentang UMKM, yang menekankan pentingnya akses permodalan, pelatihan, promosi, serta pendampingan berkelanjutan. Namun, evaluasi awal menunjukkan bahwa beberapa program belum mencapai sasaran secara merata. Kendala seperti rendahnya literasi digital pelaku UMKM, keterbatasan akses informasi, dan koordinasi yang belum optimal antar Organisasi Perangkat Daerah (OPD) menyebabkan sebagian pelaku usaha belum memanfaatkan fasilitas

yang disediakan secara maksimal. Konsekuensinya, potensi UMKM sebagai pendorong ekonomi lokal dan pendukung pembangunan IKN belum sepenuhnya terwujud. Diperlukan analisis mendalam mengenai bentuk-bentuk pemberdayaan UMKM yang telah diterapkan, faktor-faktor pendukung yang memperkuat implementasi kebijakan, serta hambatan-hambatan yang dihadapi pelaksanaan program. Dengan demikian, upaya menyusun rekomendasi kebijakan yang tepat bagi peningkatan kapasitas dan daya saing UMKM di Balikpapan dapat dirumuskan secara lebih akurat, sehingga UMKM dapat berperan optimal dalam mendukung pembangunan IKN.

1.2 Kesenjangan Masalah yang Diambil (GAP Penelitian)

Beberapa penelitian sebelumnya telah menggambarkan program pelatihan, pendampingan, dan fasilitasi pembiayaan bagi UMKM di Balikpapan, namun belum terdapat kajian yang secara komprehensif menilai sejauh mana program-program tersebut benar-benar meningkatkan kapasitas dan kinerja pelaku UMKM di lapangan. Di samping itu, meski rendahnya literasi digital sering disebut sebagai hambatan utama, belum ada studi yang mengidentifikasi secara spesifik faktor-faktor penyebab keterbatasan tersebut atau jenis pelatihan digital apa yang paling efektif bagi UMKM di berbagai wilayah Balikpapan. Selanjutnya, koordinasi antar-OPD yang selama ini masih bersifat parsial belum dianalisis secara mendalam mengenai mekanisme kolaborasi yang efektif dalam menyusun dan melaksanakan kebijakan pemberdayaan UMKM. Terakhir, perhatian program pemberdayaan umumnya terpusat di kawasan inti kota, sementara pelaku UMKM di wilayah pinggiran belum memperoleh akses yang setara terhadap layanan pembinaan dan teknologi, sehingga sejalan dengan pendapat Alfianto, D., & Lambelanova (2021) bahwa perkembangan perekonomian nasional didasarkan pada tiga elemen yang perlu diperhatikan oleh suatu pemerintahan, meliputi berbagai sumber daya—baik sumber daya alam, manusia, maupun teknologi. Elemen-elemen tersebut bergerak secara harmonis dan berkesinambungan untuk mencapai suatu pertumbuhan ekonomi yang maksimal, sehingga perlu kajian yang membandingkan hasil pemberdayaan antara pelaku di pusat dan pinggiran Balikpapan.

1.3 Penelitian Terdahulu

Beberapa studi telah meneliti pemberdayaan UMKM dan pembangunan IKN, namun dengan fokus yang berbeda-beda. Irwansyah et al., (2024) menganalisis “Dampak Pemindahan Ibukota ke Kalimantan Timur” melalui studi kasus dan analisis dokumen kebijakan, menekankan partisipasi masyarakat dalam demokrasi tanpa membahas peran UMKM secara spesifik. (Achmad et al., 2023) dalam “Pengembangan UMKM di Desa Sekitar IKN” juga menggunakan studi kasus kualitatif, menyoroti kendala modal dan pendidikan pelaku di desa, sementara penelitian ini memusatkan pada kota penyangga Balikpapan dengan karakter pasar berbeda. Pribadi et al., (2023) dalam “Urgensi Sektor UMKM sebagai Penyangga IKN” memakai pendekatan empiris yuridis untuk menegaskan kebutuhan regulasi bagi UMKM, tetapi tidak membahas strategi pemberdayaan operasional di level kota. Supriyanti et al., (2023) mengeksplorasi “Pemberdayaan Masyarakat Sekitar IKN” dengan pendekatan kualitatif, menekankan pelibatan masyarakat luas tanpa fokus khusus pada UMKM di Balikpapan Shavero, (2023) meneliti “Strategi Dinas Perdagangan dalam Pemberdayaan UMKM di Balikpapan” secara deskriptif, menguraikan rencana dan rekomendasi kebijakan, namun belum mengevaluasi efektivitas program pasca-implementasi atau peran Dinas Koperasi, UMKM, dan Perindustrian secara menyeluruh. Dengan demikian, penelitian ini hadir untuk mengisi kekosongan, yaitu analisis komprehensif terhadap implementasi, efektivitas, digitalisasi, dan sinergi antar-OPD dalam pemberdayaan UMKM di Balikpapan.

1.4 Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Penelitian ini menghadirkan pendekatan yang lebih komprehensif dibandingkan studi sebelumnya, dengan mengintegrasikan analisis efektivitas program pemberdayaan UMKM yang sudah berjalan di lapangan, khususnya yang diselenggarakan oleh Dinas Koperasi, UMKM, dan Perindustrian Kota Balikpapan. Berbeda dengan penelitian terdahulu yang hanya menyoroti aspek perencanaan kebijakan, penelitian ini mengevaluasi langsung sejauh mana intervensi seperti pelatihan literasi digital, fasilitasi promosi, dan akses pembiayaan KUR berdampak pada peningkatan kapasitas dan kinerja pelaku UMKM. Selain itu, penelitian ini secara spesifik menggali faktor penyebab rendahnya literasi digital di kalangan pelaku UMKM, sehingga dapat dirancang jenis pelatihan yang lebih tepat sasaran suatu aspek yang belum pernah dianalisis secara mendalam pada konteks Balikpapan sebelumnya.

Selanjutnya, penelitian ini membedakan evaluasi antara pelaku UMKM di pusat kota dan di wilayah pinggiran Balikpapan, yang secara umum memiliki akses teknologi dan fasilitas mendasar berbeda, yang mana hal ini didasari pendapat dari Islam et al., (2021) bahwa teknologi kontemporer yang belum mencapai tingkat adopsi yang cukup tinggi seperti di Bangladesh akibat dari sedikit pemilik yang memiliki perangkat elektronik, untuk mengintegrasikan operasi mereka secara online. Beberapa contoh yang dikutip peserta untuk menunjukkan ketidakcukupan infrastruktur TI di Bangladesh meliputi pasokan listrik yang tidak stabil, layanan internet yang terbatas dan berbiaya tinggi, serta telekomunikasi yang buruk. Dari keadaan tersebut menjadi dasar pendekatan spasial ini diterapkan meski belum pernah diterapkan dalam kajian pemberdayaan UMKM di kota penyangga IKN manapun, sehingga mampu memberikan gambaran nyata tentang kesenjangan akses dan hasil pemberdayaan. Kemudian, aspek sinergi antar-OPD juga diuji secara empiris penelitian ini menelaah mekanisme koordinasi yang selama ini masih parsial, serta mengusulkan kerangka kolaborasi ideal antara Dinas Koperasi, Dinas Perdagangan, dan Dinas Pariwisata dalam merancang program pemberdayaan yang terpadu. Dengan demikian, kombinasi evaluasi pasca-implementasi, fokus pada digitalisasi yang spesifik, pembagian wilayah evaluasi (pusat vs pinggiran), dan analisis sinergi antarlembaga menjadi kontribusi kebaruan ilmiah utama yang membedakan penelitian ini dari studi-studi sebelumnya.

1.5 Tujuan

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan secara mendalam bentuk-bentuk pemberdayaan UMKM yang dijalankan oleh Dinas Koperasi, UMKM, dan Perindustrian Kota Balikpapan, kemudian mengidentifikasi faktor-faktor yang mendukung efektivitas program pemberdayaan tersebut, serta mengungkap hambatan utama yang dihadapi dalam implementasinya sebagai perwujudan pendapat Primastuti et al., (2024) bahwa daerah penyangga yang dalam hal ini Kota Balikpapan, memegang peran strategis dalam memenuhi berbagai kebutuhan Ibu Kota Negara. Penguraian tujuan ini diharapkan dapat memberikan gambaran komprehensif mengenai sejauh mana inisiatif pemerintah daerah telah berhasil meningkatkan kapasitas dan kinerja pelaku UMKM di Balikpapan dalam mendukung pembangunan IKN.

II. METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan strategi studi kasus untuk memperoleh pemahaman mendalam mengenai pemberdayaan UMKM di Kota Balikpapan. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dengan narasumber kunci di Dinas Koperasi, UMKM, dan Perindustrian Kota Balikpapan serta beberapa pelaku UMKM yang menjadi penerima program pemberdayaan. Selain itu, peneliti juga melakukan observasi langsung pada lokasi pelaksanaan pelatihan maupun pendampingan usaha agar memperoleh gambaran situasi lapangan secara nyata. Dokumentasi tambahan berupa laporan program,

notulen pertemuan, dan materi pelatihan dikaji untuk melengkapi data lapangan dan memverifikasi informasi yang diperoleh melalui wawancara dan observasi. Data yang terkumpul selanjutnya dianalisis secara tematik, yaitu dengan mengkategorikan temuan sesuai pola pemberdayaan, faktor pendukung, dan hambatan yang muncul. Hasil analisis kemudian disintesis untuk memberikan gambaran komprehensif tentang implementasi program pemberdayaan UMKM, efektivitasnya, serta upaya penguatan yang diperlukan.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penulis menganalisis pemberdayaan peserta program jakpreneur binaan suku dinas perindustrian perdagangan koperasi usaha kecil dan menengah melalui pemanfaatan digital marketing di Kota Administrasi Jakarta Barat berdasarkan pendapat Tumija (2022), Permasalahan UMKM yang utama adalah masih kurangnya penggunaan teknologi/digitalisasi dalam pengoperasian atau pengembangan bisnis usahanya, terutama terkait dengan media digital atau e-marketing. Penulis sendiri menganalisis skripsi ini menggunakan teori Pemberdayaan Masyarakat Suharto (2010) dengan dimensi pemungkinan, penguatan perlindungan penyokongan pemeliharaan. Pembahasan tersebut dapat terlihat pada subbab berikut.

3.1 Dimensi Pemungkinan

Dimensi Pemungkinan mengacu pada upaya menciptakan lingkungan yang mendukung UMKM agar dapat mengembangkan potensi mereka secara optimal. Dalam praktiknya, Dinas Koperasi, UMKM, dan Perindustrian Kota Balikpapan telah menyediakan pelatihan keterampilan dan literasi digital untuk meningkatkan kemampuan pelaku usaha dalam memanfaatkan teknologi yang menurut (Purnomo & Purwandari, 2025) Integrasi alat digital seperti sistem reservasi online, opsi pembayaran elektronik, dan pemasaran di media sosial akan meningkatkan kepuasan pelanggan dan menyederhanakan operasional. Disertai dengan mengadakan pameran dan bazar produk lokal agar UMKM dapat menjangkau pasar baru dan memperluas jaringan konsumen. Selain itu, realisasi program Kredit Usaha Rakyat (KUR) hingga 2024 telah berhasil menyalurkan pembiayaan kepada lebih dari 2.500 UMKM aktif dari sektor kuliner, kerajinan tangan, hingga jasa. Pemerintah daerah juga menerbitkan kebijakan yang mempermudah perizinan, antara lain penerbitan Nomor Induk Berusaha (NIB) secara online dan gratis, memberikan insentif fiskal, serta menyediakan infrastruktur pendukung dan perlindungan hukum. Melalui Program Gerai UMKM, produk lokal dapat dipasarkan di fasilitas publik seperti rest area dan instansi pemerintah, sementara kolaborasi dengan marketplace nasional menguatkan promosi digital. Ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2014 juga menegaskan kewajiban pemerintah kota untuk menyediakan fasilitas pengembangan usaha dan memperluas akses pasar bagi UMKM, sesuai dengan pernyataan Primawan & Hamid (2023) bahwa Fasilitator hendaknya menerapkan falsafah pemberdayaan dengan pendekatan yang lebih manusiawi, yaitu: menempatkan masyarakat sebagai mitra sejajar, menjadi pendengar yang baik, tidak bersikap lebih pintar, tidak terburu-buru saat berkomunikasi, menguasai materi, lebih fokus pada proses/tahapan bukan kesuksesan di akhir kegiatan.

3.2 Dimensi Penguatan

Dimensi Penguatan mencakup peningkatan keterampilan teknis dan manajerial pelaku UMKM melalui pelatihan manajemen keuangan, manajemen produksi, serta pemasaran lanjutan. Dinas Koperasi, UMKM, dan Perindustrian. Menurut Irwansyah et al., (2024) Kota Balikpapan harus secara rutin menyelenggarakan peningkatan kualitas penyelenggara ekonomi melalui workshop tentang cara menyusun laporan keuangan sederhana, teknik negosiasi harga, dan strategi branding agar pelaku usaha mampu mengelola usaha secara

profesional. Selain itu, program pendampingan berkelanjutan diberikan oleh mentor usaha yang membimbing UMKM dalam perencanaan bisnis, evaluasi kinerja, dan inovasi produk. Kelompok diskusi antar-pelaku UMKM juga difasilitasi untuk saling bertukar pengalaman dan best practice dalam menghadapi tantangan pasar. Sebagai hasilnya, sejumlah pelaku UMKM menunjukkan peningkatan kemampuan dalam mengatur arus kas, menetapkan harga jual yang kompetitif, dan memperkenalkan varian produk baru yang sesuai tren konsumen.

3.3 Dimensi Perlindungan (Protecting)

Kemudahan perizinan menjadi sorotan pembuatan NIB, SNI, sertifikasi halal, BPOM, dan HAKI difasilitasi tanpa biaya oleh Sudin PPKUKM, sehingga pelaku usaha merasa prosesnya lebih ringan. Salah satu contohnya yang dirasakan salah satu peserta program Jakpreneur, Ibu suparni, pada hari Rabu, 22 Januari 2025 menjelaskan bahwa Sudin PPKUKM memberikan fasilitasi perizinan secara menyeluruh dan gratis. Perizinan yang difasilitasi oleh Sudin PPKUKM Jakarta Barat di antaranya adalah Nomor Induk Berusaha (NIB), Sertifikasi Nilai Gizi BPOM, Sertifikasi Halal, Sertifikasi Hak Kekayaan Intelektual (HAKI), dan perizinan lain yang mungkin dibutuhkan. Perlindungan hukum diwujudkan melalui pendampingan pendaftaran HAKI, memberi rasa aman atas kekayaan intelektual merek dan desain produk.

3.4 Dimensi Penyokongan

Dimensi Penyokongan mencakup berbagai bentuk dukungan pemerintah daerah untuk memperkuat keberlangsungan usaha UMKM, terutama melalui akses pembiayaan, infrastruktur, dan promosi. Dinas Koperasi, UMKM, dan Perindustrian Kota Balikpapan telah menghubungkan pelaku UMKM dengan lembaga pembiayaan seperti perbankan melalui program Kredit Usaha Rakyat (KUR), yang hingga tahun 2024 telah menjangkau lebih dari 2.500 UMKM dari berbagai sektor.

Selain pembiayaan, dukungan diberikan dalam bentuk penyediaan sarana usaha seperti gerai UMKM di lokasi strategis, partisipasi dalam pameran daerah, dan kemitraan promosi dengan marketplace nasional. Pelaku UMKM juga difasilitasi mengikuti pelatihan penggunaan media sosial untuk promosi produk, serta mendapatkan akses ke aplikasi kasir digital untuk efisiensi transaksi.

Namun demikian, sebagian pelaku usaha di pinggiran kota masih mengeluhkan keterbatasan fasilitas fisik dan minimnya pendampingan lanjutan pasca pelatihan. Ini menunjukkan bahwa penyokongan yang diberikan belum merata dan masih perlu ditingkatkan terutama pada aspek pemerataan akses serta keberlanjutan dukungan pasca-program. Dengan demikian, dimensi penyokongan perlu diperkuat melalui pengembangan infrastruktur usaha yang inklusif, kemitraan strategis jangka panjang, dan evaluasi berkala atas keberhasilan program dukungan.

3.5 Dimensi Pemeliharaan

Dimensi pemeliharaan dalam konteks pemberdayaan UMKM di Kota Balikpapan merujuk pada upaya menjaga keberlangsungan program, keberlanjutan dampak, serta penguatan kapasitas pelaku usaha secara terus-menerus agar tetap relevan dan adaptif terhadap dinamika pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN). Berdasarkan hasil penelitian, pemeliharaan dilakukan melalui penguatan literasi kewirausahaan, pendampingan usaha yang berkelanjutan, serta fasilitasi promosi dan akses pasar.

Dinas Koperasi, UMKM, dan Perindustrian Kota Balikpapan secara rutin menyelenggarakan pelatihan dan mentoring usaha sebagai bagian dari strategi pemeliharaan. Hal ini ditujukan untuk memastikan pelaku UMKM tidak hanya menerima intervensi sesaat, tetapi memiliki daya saing jangka panjang. Program-program seperti pelatihan digital

marketing, manajemen keuangan usaha, hingga fasilitasi akses Kredit Usaha Rakyat (KUR) menjadi bagian integral dari proses pemeliharaan tersebut.

Pemeliharaan juga tercermin dari keberlanjutan kemitraan antara pemerintah daerah dan pelaku usaha, termasuk pelibatan pelaku UMKM dalam rantai pasok kebutuhan logistik dan konsumsi IKN. Selain itu, aspek pemeliharaan diwujudkan melalui penyediaan fasilitas inkubator bisnis dan pusat layanan terpadu UMKM, yang memungkinkan pelaku usaha mendapatkan pendampingan intensif dan akses informasi pasar secara kontinyu. Keberhasilan pemeliharaan pemberdayaan UMKM sangat bergantung pada kolaborasi lintas sektor, pembaharuan regulasi yang adaptif, serta komitmen politik lokal yang kuat dalam menjadikan UMKM sebagai aktor utama pembangunan ekonomi berbasis kerakyatan.

3.5 Diskusi Temuan Utama Penelitian

Penulis menganalisis Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah di Kota Balikpapan Dalam Mendukung Pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN). Berdasarkan hasil pengumpulan data melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi, ditemukan lima temuan utama yang menjadi fondasi dalam merumuskan strategi penguatan UMKM yang berkelanjutan. Berikut adalah penjabaran dari masing-masing temuan:

A. Pemberdayaan UMKM Berbasis Penguatan Kapasitas

Pemberdayaan UMKM yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Balikpapan menitikberatkan pada penguatan kapasitas pelaku usaha, yang merupakan elemen utama dalam dimensi penguatan menurut teori pemberdayaan Suharto (2010). Upaya ini tercermin melalui kegiatan pelatihan kewirausahaan, manajemen usaha, serta literasi digital yang diselenggarakan oleh Dinas Koperasi, UMKM, dan Perindustrian. Salah satu program yang menonjol adalah fasilitasi pelaku UMKM untuk mengakses Kredit Usaha Rakyat (KUR) bekerja sama dengan lembaga perbankan. Program ini memberikan modal usaha yang bersifat produktif, sehingga UMKM tidak lagi bergantung pada bantuan hibah yang bersifat karitatif. Namun demikian, efektivitas pemberdayaan ini sangat bergantung pada keberlanjutan pendampingan dan konsistensi pelatihan. Banyak pelaku UMKM yang telah mengikuti pelatihan, namun belum dapat menerapkannya secara maksimal karena minimnya pendampingan pasca-pelatihan.

B. Pemerintah Daerah sebagai Fasilitator Pemberdayaan

Peran strategis Pemerintah Daerah sebagai fasilitator dan akselerator pembangunan ekonomi lokal sangat terlihat dalam pelaksanaan pemberdayaan UMKM. Pemerintah berperan dalam menyusun kebijakan, memfasilitasi pembinaan, serta menjembatani kerja sama antara pelaku usaha dengan sektor swasta dan lembaga keuangan. Meski demikian, beberapa informan menyebutkan bahwa koordinasi lintas sektor masih belum optimal. Misalnya, program pelatihan terkadang tidak dibarengi dengan pembukaan akses pasar, sehingga hasil pelatihan tidak langsung berdampak pada peningkatan omzet pelaku usaha. Selain itu, pembinaan cenderung terkonsentrasi pada UMKM yang telah terdata secara resmi, sementara UMKM informal belum sepenuhnya tersentuh oleh kebijakan.

C. Ketimpangan Akses Informasi dan Teknologi

Digitalisasi menjadi salah satu tantangan utama dalam pemberdayaan UMKM di era transformasi industri 4.0. Berdasarkan temuan penelitian, sebagian besar UMKM di Kota Balikpapan masih menghadapi hambatan dalam mengakses platform digital untuk pemasaran maupun transaksi keuangan. Literasi digital pelaku UMKM dinilai masih rendah, terutama bagi pelaku usaha berusia lanjut atau yang berasal dari latar belakang pendidikan menengah ke bawah. Hal ini menyebabkan mereka kesulitan bersaing dengan pelaku usaha yang lebih

adaptif terhadap teknologi. Dalam konteks pembangunan IKN, akses terhadap informasi dan teknologi menjadi syarat mutlak agar pelaku usaha lokal dapat berkompetisi di pasar yang semakin terbuka.

D. Keterlibatan UMKM dalam Rantai Pasok IKN Masih Terbatas

Secara geografis dan ekonomis, Kota Balikpapan memiliki posisi yang sangat strategis sebagai pintu gerbang utama IKN. Namun, hasil penelitian menunjukkan bahwa keterlibatan UMKM Balikpapan dalam rantai pasok pembangunan IKN masih tergolong rendah. Faktor utama yang menghambat adalah belum adanya integrasi sistemik antara kebutuhan proyek IKN dengan potensi produk lokal UMKM. Pelaku UMKM juga belum banyak terlibat dalam forum-forum koordinasi pengadaan barang/jasa yang dikelola oleh Otorita IKN atau kementerian/lembaga pusat. Dengan demikian, potensi besar UMKM lokal dalam mendukung sektor logistik, kuliner, konstruksi ringan, dan jasa penunjang belum dimanfaatkan secara maksimal.

E. Perlunya Desain Kebijakan Terpadu dan Berbasis Data

Temuan terakhir menekankan pentingnya desain kebijakan pemberdayaan UMKM yang lebih terintegratif dan berbasis data mutakhir. Banyak pelaku UMKM yang merasa program pemerintah masih bersifat sporadis dan belum terukur secara jelas dampaknya terhadap pertumbuhan usaha mereka. Menurut Solechah & Sugito (2023), kebijakan yang dibuat perlu mempertimbangkan analisis spasial dan sektoral, sehingga dapat membedakan kebutuhan pelaku UMKM menurut lokasi, jenis usaha, dan kapasitas usahanya. Selain itu, penting pula membangun sistem pemantauan dan evaluasi berbasis teknologi informasi agar program pemberdayaan dapat dikontrol dan disesuaikan dengan kebutuhan lapangan secara real-time. Hal ini sesuai dengan prinsip “pemeliharaan” dalam konsep pemberdayaan, yaitu menjaga keberlanjutan hasil program dan memperbarui intervensi sesuai dinamika sosial ekonomi yang berkembang.

3.6 Diskusi Temuan Menarik Lainnya

Selain temuan utama yang telah dibahas sebelumnya, penelitian ini juga mengungkap sejumlah temuan menarik lainnya yang memberikan gambaran lebih dalam mengenai dinamika pemberdayaan UMKM di Kota Balikpapan. Salah satu hal yang mencolok adalah adanya perubahan pola usaha pelaku UMKM pasca pengumuman pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN). Banyak pelaku usaha yang secara mandiri mulai menyesuaikan jenis usahanya dengan kebutuhan potensial dari pembangunan IKN, seperti beralih ke sektor kuliner, logistik, dan jasa penunjang. Meskipun ini menunjukkan respons adaptif dari masyarakat, namun tanpa pendampingan yang sistematis, kecenderungan ini berisiko menimbulkan persaingan tidak sehat dan ketidakseimbangan sektor usaha.

Selain itu, masih ditemukan adanya ketergantungan pelaku UMKM terhadap bantuan program pemerintah, di mana sebagian besar pelaku lebih mengandalkan pelatihan dan fasilitasi dari dinas tanpa mengembangkan inisiatif usaha secara mandiri. Minimnya keterlibatan UMKM dalam forum perencanaan pembangunan juga memperlihatkan bahwa pendekatan pemberdayaan masih bersifat top-down. Hal ini diperparah oleh ketimpangan akses terhadap infrastruktur ekonomi dan fasilitas pendukung usaha, terutama bagi pelaku usaha di wilayah pinggiran. Padahal, UMKM lokal memiliki potensi besar dalam mengangkat identitas daerah, khususnya melalui produk berbasis kearifan lokal yang jika dikelola dengan baik dapat menjadi kekuatan ekonomi kreatif daerah. Temuan-temuan ini menegaskan perlunya strategi pemberdayaan yang tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga berbasis partisipasi, keadilan akses, dan penguatan identitas lokal.

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian mengenai pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Kota Balikpapan dalam mendukung pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN), dapat disimpulkan bahwa proses pemberdayaan yang dilakukan oleh pemerintah daerah telah menunjukkan upaya strategis melalui pelatihan kewirausahaan, fasilitasi akses permodalan, promosi produk, serta pendampingan usaha. Program-program tersebut telah membantu pelaku UMKM meningkatkan kapasitas dan daya saing, khususnya dalam menyambut peluang ekonomi yang muncul akibat pemindahan pusat pemerintahan nasional ke Kalimantan Timur.

Namun demikian, pemberdayaan yang dilaksanakan masih menghadapi sejumlah tantangan seperti ketimpangan akses informasi dan teknologi, keterbatasan partisipasi UMKM dalam proses perencanaan, serta belum optimalnya integrasi UMKM dalam rantai pasok pembangunan IKN. Selain itu, munculnya fenomena ketergantungan terhadap program pemerintah dan ketidakseimbangan akses antar wilayah juga menunjukkan bahwa pemberdayaan belum sepenuhnya menghasilkan kemandirian. Oleh karena itu, diperlukan strategi yang lebih partisipatif, berbasis data, dan berorientasi pada penguatan kapasitas secara menyeluruh agar UMKM dapat menjadi pilar utama dalam pertumbuhan ekonomi daerah sekaligus aktor aktif dalam mendukung keberhasilan pembangunan IKN secara berkelanjutan.

Keterbatasan Penelitian. Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan yang perlu dicermati saat menafsirkan hasil dan merencanakan studi lanjutan. Pertama keterbatasan waktu dan sumber daya menyebabkan jangkauan penelitian hanya terfokus pada pelaku UMKM yang terdaftar secara resmi di bawah koordinasi Dinas Koperasi, UMKM, dan Perindustrian Kota Balikpapan. Dengan demikian, UMKM yang beroperasi secara informal atau belum memiliki legalitas usaha belum banyak terwakili. Kedua, pendekatan kualitatif dengan studi kasus tunggal membatasi generalisasi hasil penelitian ini untuk konteks kota lain atau wilayah penyangga IKN secara keseluruhan. Ketiga, keterbatasan dalam akses data real-time mengenai kontribusi langsung UMKM terhadap proyek-proyek IKN menyebabkan analisis keterlibatan UMKM dalam rantai pasok lebih bersifat eksploratif daripada kuantitatif. Selain itu, belum semua informan dari sektor swasta atau Otorita IKN dapat diwawancarai secara langsung, sehingga perspektif lintas pemangku kepentingan belum tergali secara menyeluruh.

Arah Masa Depan Penelitian (Future Work). Penelitian selanjutnya disarankan untuk menjangkau pelaku UMKM informal yang belum terdata resmi, serta memperluas wilayah studi ke daerah penyangga IKN lainnya guna melihat perbandingan kebijakan pemberdayaan. Penggunaan pendekatan mixed methods dan analisis dampak kuantitatif juga perlu dilakukan agar hasil penelitian lebih komprehensif dan terukur. Selain itu, keterlibatan sektor swasta dan kolaborasi lintas pemangku kepentingan dapat menjadi fokus kajian lanjutan untuk membangun ekosistem pemberdayaan UMKM yang lebih berkelanjutan.

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Suku Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Administrasi Jakarta Barat beserta seluruh jajaran pejabat dan stafnya yang telah memberikan izin, data, dan wawasan sebagai informan serta responden dalam penelitian ini serta kepada semua instansi dan lembaga terkait yang telah memberikan dukungan dokumentasi dan akses lapangan, sehingga penelitian dapat terlaksana dengan baik dan memberikan kontribusi bagi pengembangan digital marketing UMKM di Jakarta Barat.

VI. DAFTAR PUSTAKA

- Achmad, G. N., Yulianti, S. D., Sharaha, M., Priandana, M. A., Khatimah, N., Hidayat, A. N., M., N. J., Handayani, Y. T., Aditya, D. F., & Dary, R. W. (2023). Pengembangan Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah Dalam Rangka Pertumbuhan Ekonomi Di Desa Sekitar Ibu Kota Nusantara. *Jurnal Riset Pembangunan*, 6(1), 51–65. <https://doi.org/10.36087/jrp.v6i1.181>
- Alfianto, D., & Lambelanova, R. (2021). Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Menengah Susu Sapi Perah di Kabupaten Boyolali Provinsi Jawa Tengah. *J-3P (Jurnal Pembangunan Pemberdayaan Pemerintahan)*, 6(2)(November), 91–114. <https://ejournal.ipdn.ac.id/JPDPP/article/view/1960>
- Handoko, W., Sulaiman, A. I., Sugito, T., & Sabiq, A. (2024). Empowering Former Women Migrant Workers: Enhancing SocioEconomic Opportunities and Inclusion for Sustainable Development. *Academic Journal of Interdisciplinary Studies*, 13(1), 199–210. <https://doi.org/10.36941/ajis-2024-0015>
- Irwansyah, I., Daryono, D., & Mangele, I. J. (2024). Dampak Pemindahan Ibukota Ke Kalimantan Timur : Perspektif Democracy Civil Society. *INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research*, 4(3), 6681–6691. <https://doi.org/https://doi.org/10.31004/innovative.v4i3.11168>
- Islam, M. N., M. Ozuem, W., Bowen, G., Willis, M., & Ng, R. (2021). An empirical investigation and conceptual model of perceptions, support, and barriers to marketing in social enterprises in Bangladesh. *Sustainability (Switzerland)*, 13(1), 1–20. <https://doi.org/10.3390/su13010345>
- Pribadi, D. S., Nur, I. T., & Wardhana, K. W. (2023). Urgensi Sektor UMKM Persaingan Usaha Sebagai Penyangga Ibu Kota Negara Nusantara. *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam*, 5(2), 1111–1120. <https://doi.org/10.37680/almanhaj.v5i2.2929>
- Primastuti, A., Yahya, A. S., Nooraini, A., & Jeddawi, M. (2024). ANALISIS POTENSI EKONOMI PROVINSI SULAWESI SELATAN SEBAGAI DAERAH PENYANGGA DALAM PEMBANGUNAN IBUKOTA NEGARA. *Jurnal Ilmu Pemerintahan Widya Praja*, 50(1), 62–78. <https://doi.org/10.33701/jipwp.50il.4077>
- Primawan, A., & Hamid, H. (2023). *Empowerment of Umkm Craftsmakers of Dayak Tie Woven Fabrics in Ensaid Panjang Village , Sintang Regency*. *Pallangga praja*, 5(2). <https://doi.org/10.61076/jpp.v5i2.3877>
- Purnomo, S., & Purwandari, S. (2025). A Comprehensive Micro, Small, and Medium Enterprise Empowerment Model for Developing Sustainable Tourism Villages in Rural

Communities: A Perspective. *Sustainability* (Switzerland), 17(4).
<https://doi.org/10.3390/su17041368>

- Santoso, E. B., Wardana, D. R., & Rahmadanita, A. (2024). PEMBERDAYAAN PELAKU USAHA MIKRO KERAJINAN MANIK-MANIK DI KECAMATAN TENGGARONG KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA PROVINSI EMPOWERMENT OF BEAD CRAFT MICRO-ENTERPRISES BY THE COOPERATIVES AND SMES OFFICE IN TENGGARONG SUB-DISTRICT , KUTAI KARTANEGARA DISTRICT , EA. *Jurnal Ilmiah Wahana Bhakti Praja*, 14(2), 112–123.
<https://10.0.131.165/jiwbp.v14i2.4847%0D>
- Shavero, I. A. (2023). Strategi Dinas Perdagangan dalam Pemberdayaan pelaku UMKM untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Kota Balikpapan. *Repository IPDN*.
<http://eprints.ipdn.ac.id/13039/>
- Solechah, W. M., & Sugito, S. (2023). Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan sebagai Kepentingan Nasional Indonesia dalam Presidensi G-20. *Dialektika : Jurnal Ekonomi Dan Ilmu Sosial*, 8(1), 12–23. <https://doi.org/10.36636/dialektika.v8i1.1487>
- Suharto, E. (2010). *CSR dan COMDEV: investasi kreatif perusahaan di era globalisasi* (Cet.1.). Bandung : Alfabeta, 2010.
- Supriyanti, S. siti, Aziz, N. L. L., Paluseri, A. R. A., Fazri, M., Syahid, C. N., Oktarina, A., & Kusmayanti, J. D. (2023). Pemberdayaan masyarakat sekitar di wilayah ibu kota nusantara. *Jurnal Masyarakat Indonesia*, 49(1), 93–101.
<https://doi.org/https://doi.org/10.14203/jmi.v49i1.1290>
- Tumija. (2022). Peran Pemerintah dan Partisipasi Masyarakat dalam Peningkatan Usaha Mikro , Kecil , dan Menengah COVID-19 di Cipageran. *Civitas Consecratio, Volume 2 N(7)*, 25–37. <https://doi.org/10.33701/cc.v2i1.2328>